

## Megawati Bakal Umumkan Capres yang akan Diusung PDI-P pada 2023

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P mengungkap, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan akan mendeklarasikan calon presiden (capres) yang mereka usung pada 2023.

"Ibu Mega telah memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada 2023. Jadi itu bocoran yang saya sampaikan bahwa capres dari PDI-P bocorannya akan diumumkan pada 2023 ya," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12).

Hasto tidak mau membocorkan siapa nama dari capres dari PDIP yang akan didedeklarasikan Megawati pada tahun depan. Cuman Hasto menyebut bahwa sosok itu bisa melanjutkan napas perjuangan Presiden RI ke-1 Soekarno,

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi). "Bocoran kedua, calon itu yang diputuskan tentu saja yang mampu melanjutkan napas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi," tuturnya.

Bocoran terakhir dari Hasto, capres yang akan diumumkan ini sudah disiapkan secara matang untuk menjadi pemimpin. Sebab, menurutnya, seorang pemimpin harus bisa memikul tanggung jawab bagi masa depan bangsa.

"Ketiga, bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan," imbuh Hasto. ■ han

## Sandiaga Bisa Dianggap Pemberontak jika Tak Patuhi Keputusan Gerindra

JAKARTA (IM) - Sandiaga bisa dianggap sebagai pemberontak oleh Partai Gerindra jika beranugerah untuk kepentingan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Justru saya memaknai adanya kekecewaan sekaligus mempertanyakan sikap Sandiaga Uno yang mbalelo (memberontak) terhadap keputusan final Gerindra yang akan mencapres Prabowo," kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Prata-

ma, Ari Junaedi, kepada wartawan, Jumat (30/12). Ari menyebut bahwa bagi Partai Gerindra, Prabowo Subianto merupakan roh partai. Belasan tahun parpol ber lambang garuda itu dipimpin oleh Prabowo. Apalagi Gerindra juga telah menegaskan, mengusung Prabowo sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024 adalah harga mati. Oleh karenanya, tak heran jika Gerindra bakal antipati terhadap kadernya yang bermotif maju pilpres.

"Sikap kader yang keluar dari garis partai tentu akan dipersalahkan hengkang dari partai," ujarnya. Jika benar Sandiaga merapat ke PPP, Gerindra bakal merugi karena kehilangan salah satu kader

terbaik. Endorsement buat Prabowo pun bakal berkurang. Sebaliknya, PPP akan banyak diuntungkan karena mendapat limpaan elektoral atau efek ekor jas dari elektabilitas Sandiaga yang terbilang lumayan.

Sementara, buat Sandi, beranugerah ke partai lain merupakan bagian dari upayanya untuk mewujudkan ambisi maju sebagai capres atau calon wakil presiden (cawapres).

"Bagi Sandi sendiri ini adalah langkah peruntungan politik mengingat dia tidak mendapat tiket sebagai capres atau cawapres dari Gerindra sementara dia ingin mencari tiket dari PPP," kata Ari.

Namun demikian, lanjut Ari, Sandi seharusnya berpikir matang terkait ini. Sebab, oleh sejumlah lembaga survei, PPP diprediksi bakal lenyap dari DPR pasca Pemilu 2024 karena diperkirakan tidak memenuhi presidential threshold atau ambang batas Parlemen 4 persen.

Dengan demikian, saham politik partai ber lambang Kabah itu di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan PPP, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun tak akan seberapa besar. ■ mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDONOR DARAH SUKARELA

Gubernur Jawa Timur Khoffah Indar Parawansa (ketiga kiri) didampingi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur Imam Utomo (kedua kiri) berfoto bersama perwakilan pendonor darah saat acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Satya Lencana Donor Darah Sukarela (DDS) 75 kali di Gedung Negara Graha, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/12). Kegiatan yang dihadiri 526 orang pendonor darah sukarela dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut guna memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mereka sekaligus untuk memotivasi yang lain agar secara sukarela melakukan aksi sosial donor darah.

## PEMBUNYAN BERENCANA BRIGADIR J

# Upaya Ferdly Sambo Seret Bharada E Menjadi Pelaku Utama Bakal Sulit

Upaya kubu Ferdly Sambo mempertahankan kelayakan status JC Bharada E, diniai upaya menggiring opini untuk menyelamatkan mereka dari hukuman maksimal.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi meyakini bahwa upaya kubu Ferdly Sambo untuk menjadikan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, bakal sulit.

Edwin yakin bahwa jika penuntut umum serta majelis hakim akan mempertimbangkan status *justice collaborator* (JC) Bharada E.

"Menurut saya agak sulit posisi pengacara FS ya untuk

memutar balik situasi dan mengeliminasi atau melegitimasi posisi Bharada E sebagai JC," kata Edwin seperti dikutip dari program Sapa Indonesia pagi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (29/12).

Edwin menyatakan LPSK mengabdikan permohonan perlindungan dan status JC kepada Richard dengan mempertimbangan berbagai hal. Salah satunya adalah Richard benar-benar membuka fakta di balik peristiwa berdarah itu hingga persidangan.

Menurut Edwin, justru karena pengakuan dari Richard

maka kasus itu terbongkar dan saat ini sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Karena yang merasakan manfaat dari JC, tentu pertama yang membuat dakwaannya itu Jaksa Penuntut Umum, kedua hakim yang membuat terang peristiwa seperti apa dan kemudian diputuskan dengan vonis," ucap Edwin.

Edwin menambahkan, upaya tim kuasa hukum Ferdly Sambo yang terus mengungkit kelayakan status JC yang diberikan kepada Richard cuma sekadar upaya menggiring opini masyarakat dan menyelamatkan klien mereka dari hukuman maksimal.

"Secara hukum menurut saya, sejauh ini sih sering saya katakan, arahnya ini sudah jelas, jadi secara hukum enggak ada keraguan. Apa keterangan Bharada E ketika di persidangan, bagaimana sikap jaksa dan hakim terhadap Bharada E

dan terhadap empat terdakwa lainnya itu sudah terang," ucap Edwin.

Edwin berharap masyarakat mengingat kembali upaya proses penyelidikan dan penyidikan Polri dalam kasus tewasnya Yosua yang berliku-liku. Sebab dari pengakuan Richard terungkap Sambo merancang skenario buat menutupi jejak kejahatannya dalam perkara itu.

Richard Eliezer atau Bharada E tidak merasa atau dalam kondisi tertekan saat memberikan pengakuan tentang fakta kejadian di balik pembunuhan terhadap Yosua.

"Pengakuan itu bukan lahir dari tekanan, bukan lahir dari penyesalan, tapi lahir dari kesadaran, dia tuliskan pengakuannya kemudian dituangkan dalam BAP," ucap Edwin.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan

Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Ferdly Sambo yang saat kejadian menjabat Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri. Pembunuhan terhadap Brigadir J, Ferdly Sambo melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf. Brigadir J tewas ditembak mati di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdly Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal Wibowo, dan Kwat Ma'ruf didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsidi Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kasus ini, Richard adalah terdakwa satu-satunya yang mendapat status *justice collaborator* atau saksi pelaku. ■ han

## Panglima TNI Tambah Pasukan Elite di Natuna

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan khususnya di Kepulauan Natuna, dengan menambah personel pasukan elite untuk pengamanan.

"Nah maknanya nanti akan kita fokuskan. Mungkin untuk Natuna nanti yang akan kita tambah," kata Yudo Margono saat ditemui usai upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/12).

Mantan KSAL ini menjelaskan, bahwa pengamanan di wilayah perbatasan lain sudah terlaksana dengan baik, sehingga tidak perlu ada penambahan.

"Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, enggak perlu penambahan. Mungkin Natuna yang akan ada penambahan," ujarnya.

Sebelumnya, Yudo mengungkapkan, setidaknya ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan. Sebanyak 10 perbatasan di antaranya merupakan perbatasan laut.

"Tentunya kalau kita bicara negara, yang perlu kita waspadai kita perhatikan, tentunya daerah perbatasan. Kita ini kan memiliki 10 perbatasan laut dan dua perbatasan darat. Nah ini yang potensinya

paling tinggi," kata Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dari titik kerawanan tersebut, sudah dilakukan diplomasi di perbatasan yang berada di darat. Namun, Yudo menyebut salah satu yang paling sulit dilakukan yakni perbatasan laut Natuna.

"Tapi memang tidak mudah, perbatasan itu tidak dalam waktu satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, dari tahun 73 tidak selesai. Artinya tidak gampang sehingga kita tetap melaksanakan kerjasama, diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," katanya.

Selain mengupayakan diplomasi dengan negara tetangga, Yudo mengatakan, pihaknya juga akan memaksimalkan tiga matra TNI dalam melakukan pengamanan.

"Tentunya perbatasan ini perlu kita laksanakan deployment kekuatan, baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kerawanannya dimulai dari itu," katanya.

"Kita tidak berharap terjadinya itu, tapi kita tetap siap antisipasi segala yang terjadi. Tentunya kekuatan Darat, Laut Udara, kita juga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby. Kita juga tidak lepas dari latihan, supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasionalnya," katanya. ■ mei



SHALAT JUMAT IMIGRAN ETNIS ROHINGYA Sejumlah imigran etnis Rohingya melaksanakan Shalat Jumat di lokasi penampungan sementara di SMP Negeri 2 Cunei, Gampong Cunei, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, Jumat (30/12).

## KPK Selidiki Siapa Pemilik Apartemen yang Ditempati Lukas Enembe di Jakarta

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki status kepemilikan Apartemen yang kerap ditempati Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat berada di Jakarta.

Terkait hal ini, penyidik KPK memeriksa Kiki Otto Kurniawan yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs di perusahaan tambang PT Indika Energy Tbk, Kamis (29/12).

Kiki Otto diperiksa sebagai saksi karena diduga mengetahui siapa pemilik Apartemen yang kerap ditempati oleh Lukas Enembe dan keluarganya, jika berada di Jakarta. Penyidik mencurigai apartemen tersebut masih berkaitan dengan kasus Lukas Enembe.

"Kiki Otto Kurniawan, saksi hadir dan didalam soal pengetahuan saksi di antaranya mengenai status apartemen di Jakarta yang menjadi tempat tinggal tersangka

LE dan keluarganya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (30/12). Seperti diketahui, tim KPK telah melakukan pengecekan di apartemen dan kediaman Lukas Enembe di Jakarta pada Rabu (9/11) lalu. Dari dua lokasi tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai emas batangan serta catatan keuangan yang diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi Lukas.

Lukas Enembe diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri hingga 7 Maret 2023. ■ mei

## PDI-P Sebut Pertemuan Jokowi dengan FX Rudy Tak Terkait Wacana "Reshuffle"

JAKARTA (IM) - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua DPC PDI-P Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, disebut tidak terkait wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang banyak dibicarakan elit politik dalam beberapa hari ini.

"Karena Pak Rudy ini nafas, dan jiwanya itu adalah merah, PDI Perjuangan, sehingga berbagai diskusi-diskusi politik juga dilakukan. Tetapi hal tersebut tidak terkait dengan reshuffle," papar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12).

Hasto menyebutkan telah menghubungi Rudy secara langsung pasca pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/12).

Hasto menuturkan, Rudy mengaku pertemuan dengan Jokowi hanya berbagi kerinduan.

"Kita tahu bahwa proses kepemimpinan Pak Jokowi tidak terlepas dari campuran Ibu Megawati Soekarnoputri yang tentunya saat itu menerima masukan dari Pak Rudy tentang sosok Pak Jokowi," ungkapnya.

Hasto menegaskan, sebagai politisi senior, masukan Rudy tentang dinamika politik Tanah Air juga dibutuhkan Jokowi, termasuk soal kepentingan PDI-P.

"Sehingga pertemuan itu juga dalam rangka kangen-kangenan tetapi sebagai politisi senior tentu saja membahas berbagai hal yang terkait kepentingan partai," tandasnya.

Diketahui wacana bongkar pasang formasi Kabinet Indonesia Maju kembali muncul pasca pernyataan Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

"Mungkin (reshuffle)," katanya singkat.

Di sisi lain, Rudy pun telah menampik jika pertemuan dengan Jokowi membahas soal reshuffle tersebut. Ia mengklaim sedang mampir ke Jakarta dan menyempatkan diri bertemu Jokowi.

"Enggak bahas apa-apa, orang saya tuh mampir. Saya kalau ke sini (Jakarta), itu saya laporan ke Pak Menseng. Kalau ada waktu longgar, saya tak mampir sowan (ke Jokowi), sudah itu saja," kata Rudy saat ditemui wartawan, Selasa (27/12).

Rudy juga menegaskan tak membahas apapun soal dinamika politik.

"Enggak ada pembicaraan politik, enggak ada pembicaraan pemerintahan, enggak ada pembicaraan ulang tahun PDI Perjuangan. Yang ada pembicaraan guyonan tok saya dengan beliau," tandasnya. ■ han



DISKUSI PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI TERNATE Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Pudja Sutamat (kanan) memberi sambutan saat diskusi Focus Group Discussion (FGD) Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (30/12). Diskusi tersebut mengambil tema Peran KPU Maluku Utara dan Media dalam sukseskan jelang Pemilu 2024.

PENGUMUMAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	
<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan NPWP 01.341.765.4-054.000, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Lt. 18 &amp; 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190, No. telepon (021) 2924 9088, dengan ini mengumumkan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih untuk tahun buku 2022 sebesar Rp33.963.151.503 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) sejumlah tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:</p>	
1. PT Tritan Adhitama Nugraha	Rp25.800.020.351,00
2. PT Bango Perkasa Sinergi	Rp3.619.543.679,00
3. PT Banten Global Development	Rp892.500.000,00
4. Angelika Budianto	Rp653.063.270,00
5. Matusi Budianto	Rp2.668.058.626,00
6. Antonio Agustino Wibowo	Rp329.965.577,00
<p>Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan diketahui.</p>	
<p>Jakarta, 31 Desember 2022 Direksi Perseroan</p>	